



INDEKS KEBERLANJUTAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA 2023

DITERBITKAN OLEH:

Konsil LSM Indonesia – Yayasan Penabulu – Perkumpulan Lokadaya

ATAS DUKUNGAN:

European Union melalui program Co-Evolve 2

Cetakan Pertama | Mei 2024

ACKNOWLEDGEMENTS

Indeks ini dikembangkan pertama kali oleh United States Agency for International Development Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance Center of Excellence on Democracy, Human Rights and Governance. Dikembangkan di 80 negara termasuk Indonesia melalui FHI360 dengan mitra lokal Konsil LSM Indonesia hingga tahun 2021.

Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia 2023 tidak berhubungan langsung dengan beberapa lembaga di atas. Substansi opini dan penilaian untuk 2023 ini berada di bawah tanggung jawab sepenuhnya tim penulis dan tim panel ahli yang dibentuk.

TIM RISET

TIM RISET UTAMA:

Anick HT
Sarwitri
Misran Lubis

DESK RISET & SURVEI:

Yusep
Munawar
Sofyan
Hana Hanifah
Nur Azizah

PANEL AHLI:

Sulistri
Theresia Sri Endras Iswarini
Suhandoko Soetomo
Sunarman Sukamto
M. Slamet Raharjo
Jajang Jamaludin
Rizky Argama
Iwan Misthohizzaman
M. Arifin Purwakananta
Prayogo

REVIEWER:

Meuthia Ganie-Rochman
Hurriyah
Eko Komara

Daftar Isi

iv Pengantar

01 Keberlanjutan OMS Secara Keseluruhan

05 DIMENSI 1. Lingkungan Hukum

09 DIMENSI 2. Kapasitas Organisasi

14 DIMENSI 3. Kemampuan Finansial

18 DIMENSI 4. Advokasi

21 DIMENSI 5. Penyediaan Layanan

25 DIMENSI 6. Infrastruktur Sektoral

29 DIMENSI 7. Citra Publik

PENGANTAR

Latar Belakang

The Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) atau Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil adalah laporan yang mengukur perkembangan keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan menggunakan 7 dimensi dan 36 sub dimensi. Ketujuh dimensi tersebut adalah lingkungan hukum, kapasitas organisasi, kemampuan finansial, advokasi, penyediaan layanan, infrastruktur sektoral, dan citra publik. Laporan CSOSI disusun setiap tahun. Indeks ini dimaksudkan untuk menjadi sumber informasi yang berguna bagi OMS, pemerintah, lembaga donor, akademisi, dan lainnya yang ingin lebih memahami dan memantau aspek kunci keberlanjutan OMS. Laporan ini dikembangkan oleh USAID.

Konsil LSM Indonesia sudah terlibat menyiapkan CSOSI sejak tahun 2014. CSOSI

2023 merupakan laporan kesembilan yang disiapkan oleh Konsil LSM Indonesia. Pada tahun 2022, CSOSI untuk chapter Indonesia dihentikan atau ditiadakan oleh pihak USAID.

CSOSI tidak hanya dilakukan di Indonesia saja tapi di banyak negara di dunia. Pada CSOSI 2021 ada 73 negara yang terlibat. Untuk tingkat Asia, ada delapan negara yang terlibat, yaitu: Nepal, Bangladesh, Thailand, Filipina, Cambodia, Sri Langka, Timor Leste, dan Indonesia.

Proses penilaian ini melibatkan panel ahli yang secara khusus diundang untuk melihat perkembangan masing-masing dimensi secara detail, dan membandingkan dengan indeks tahun sebelumnya. Panel ahli ini menyepakati skor untuk setiap dimensi, yang berkisar dari 1 (tingkat keberlanjutan yang paling tinggi) hingga 7 (yang paling rendah).

Mengapa Indeks Keberlanjutan Masyarakat Sipil?

OMS di Indonesia mengalami dinamika yang cukup menarik, karena terkait dengan perjalanan dan konsolidasi demokratisasi, terutama tata kelola pemerintahan. Dalam pembahasan tentang proses demokratisasi, masyarakat sipil adalah aktor penting yang memiliki peran krusial, di luar aktor negara (*state*), dan swasta (*private sector*).

Dalam konteks Indonesia, kontribusi dan peran OMS sangat esensial. Peran ini memiliki spektrum yang luas mulai dari memperjuangkan hak asasi manusia dan hak sipil, khususnya hak masyarakat lemah, memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang terkait dengan isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pelayanan sosial, budaya, dan lain sebagainya, termasuk merawat daya kritis dan kontrol sosial masyarakat terhadap proses pembangunan.

Posisi krusial OMS ini tentu mempersyaratkan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) dan kapasitas OMS yang memadai dalam menjalankan fungsinya. Juga aspek-aspek lain yang memungkinkan ekosistem kebebasan sipil terawat.

Karena itu, sangat penting melakukan identifikasi secara terukur dan reguler untuk memastikan lingkungan yang kondusif bagi berfungsi optimalnya OMS di Indonesia, terutama dalam konteks memetakan tingkat resiliensi dan keberlanjutannya. Hal ini juga penting untuk memberi kerangka umum landasan demokratisasi Indonesia, mengingat demokrasi akan berfungsi optimal ketika masyarakat sipil juga kuat. Dalam kepentingan yang lebih spesifik, pengukuran ini juga diperlukan dalam rangka memetakan bentuk intervensi dan penguatan kapasitas yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan OMS.

Proses Penyusunan

1. Desk Research

Riset awal ini adalah proses mengidentifikasi seluruh kasus-kasus yang melibatkan OMS di Indonesia berdasarkan keseluruhan indikator dalam tujuh dimensi yang telah ditentukan selama tahun 2023 (1 Januari-31 Desember 2023). Identifikasi ini dilakukan melalui penelusuran berita daring, laporan berbasis website OMS, hasil penelitian, dokumen kebijakan, maupun wawancara langsung dengan OMS jika kasus tertentu dianggap membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Salah satu data sekunder yang juga menjadi rujukan dalam hal ini adalah data hasil survei eksistensi dan kapasitas OMS yang dilakukan Konsil LSM bekerja sama dengan INFID di tahun 2023 dengan 509 responden OMS di seluruh Indonesia.

Hasil desk riset ini digunakan sebagai informasi dasar yang didistribusikan dan atau dipresentasikan kepada tim panel ahli sebelum melakukan penilaian.

2. Survei Daring

Survei Online ini dirumuskan berdasarkan indikator yang juga merujuk langsung kepada poin-poin dalam keseluruhan tujuh dimensi penilaian, yang dikembangkan bersama dengan FHI360. Survei ini kemudian berhasil mendapatkan respons dari 69 responden dari 21 provinsi di Indonesia, meskipun form survei telah disebarakan kepada ribuan lembaga.

Hasil survei daring ini digunakan sebagai data pendamping (sekunder) dari proses penilaian yang dilakukan oleh Panel Ahli. Disadari bahwa survei ini tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Survei ini hanya dimaksudkan untuk melihat persepsi umum yang muncul dari OMS yang terjaring secara acak.

3. Pertemuan Panel Ahli

Penilaian dari Panel Ahli inilah yang digunakan sebagai rujukan utama Indeks Keberlanjutan OMS. Panel Ahli dipilih dari berbagai representasi unsur, bidang isu, disiplin, dan kecenderungan. Para ahli juga telah berpengalaman dalam dunia organisasi masyarakat sipil. Keragaman representasi memungkinkan saling konfirmasi antar Panel Ahli sehingga turut memperkuat objektivitas penilaian.

Panel ahli untuk CSOSI Indonesia 2023 kali ini terdiri dari 10 ahli dengan beragam gender. Mereka adalah:

1. Sulistri, Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (FSB KAMIPARHO KSBSI). Sejak 1992 telah aktif di serikat buruh. Berpartisipasi dan menjadi ketua delegasi dalam International Labour Conference yang menetapkan konvensi ILO nomor 189.
2. Theresia Sri Endras Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan. Sejak 1997 bekerja secara konsisten dalam isu perempuan.
3. Suhandoko Soetomo, Pengurus Remdec Swaprakarsa. Berpengalaman sebagai konsultan dan pendamping untuk capacity building dan community engagement.
4. Sunarman Sukamto, Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden. Terlibat dalam isu-isu hak kaum disabilitas.
5. Slamet Raharjo, Ketua Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL Ina), organisasi jaringan nasional yang beranggotakan 91 organisasi di 29 provinsi. Menggeluti isu-isu hak minoritas gender dan HIV AIDS.
6. Jajang Jamaludin, Pemimpin Redaksi Koran Tempo. Pernah menjadi pengurus Aliansi Jurnalis Independen daerah dan pusat.
7. Rizky Argama, Direktur Eksekutif PSHK, editor Jurnal Hukum Jentera.
8. Iwan Misthohizzaman, Direktur INFID. Berpengalaman bekerja di banyak NGO dan lembaga donor.
9. M. Arifin Purwakananta, Deputi 1 Bidang Pengumpulan, BAZNAS. Sejak 1999 telah aktif di dunia NGO, terutama dalam isu penggalangan sumber daya dan fundraising. Saat ini pun masih menjadi konsultan untuk beberapa lembaga NGO.
10. Prayogo, Analis Kebijakan Ahli Madya, Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri.

4. Penulisan laporan

Penulisan laporan dilakukan oleh Tim Peneliti Utama dengan menganalisis seluruh proses dan tahapan penelitian, dan terutama pertimbangan panel ahli dalam memberikan penilaian/indeks.

Tujuh Dimensi Penilaian

7 Dimensi Penilaian dalam CSOSI 2023 ini adalah:

01

LINGKUNGAN HUKUM

Dimensi ini terdiri dari 6 sub-dimensi yaitu:

- Pendaftaran - Prosedur hukum untuk meresmikan keberadaan OMS
- Operasi – Penegakan hukum dan manfaatnya terhadap OMS
- Pelanggaran Negara - Penyalahgunaan yang dilakukan terhadap OMS dan anggotanya oleh institusi negara
- Perpajakan – Kebijakan pajak yang mempengaruhi OMS
- Akses terhadap Sumber Daya
- Kapasitas Hukum Lokal - Ketersediaan dan kualitas keahlian hukum untuk OMS

02

KAPASITAS ORGANISASI:

Dimensi ini terdiri dari 5 sub-dimensi, yaitu:

- Pembangunan Konstituensi
- Perencanaan Strategis
- Struktur Pengelolaan Internal
- Pengelolaan Staf OMS – Kualitas dan Manajemen Sumber Daya Manusia
- Akses Pada Teknologi

03

KEMAMPUAN FINANSIAL:

Dimensi ini terdiri dari 6 sub-dimensi yaitu:

- Diversifikasi - Akses ke berbagai sumber pendanaan
- Dukungan Lokal - Sumber pendanaan dan sumber domestic
- Dukungan Luar Negeri - Sumber pendanaan dan sumber luar negeri
- Fundraising - Kapasitas OMS untuk mengumpulkan dana
- Penghasilan Yang Dibayar - Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk dan layanan
- Sistem Manajemen Keuangan - Proses, prosedur dan alat untuk mengelola sumber keuangan dan operasi

ix

04

ADVOKASI:

Dimensi ini terdiri dari 4 sub-dimensi yaitu:

- Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pusat
- Inisiatif Advokasi Kebijakan
Inisiatif untuk mendorong agenda publik, opini publik, atau undang-undang
- Upaya Melobi- Keterlibatan dengan anggota parlemen untuk secara langsung mempengaruhi proses legislative
- Advokasi Reformasi OMS - Inisiatif untuk mempromosikan kerangka hukum dan peraturan yang lebih menguntungkan bagi sektor OMS

05

PENYEDIAAN LAYANAN:

Dimensi ini terdiri dari 5 sub-dimensi yaitu:

- Cakupan Barang Dan Jasa: ragam barang dan jasa yang ditawarkan
- 2) Respon ke Masyarakat - Sejauh mana barang dan jasa memenuhi kebutuhan local
- Konstituensi dan Klien - Orang, organisasi dan masyarakat yang memanfaatkan atau mendapatkan keuntungan dari kinerja OMS
- Pemulihan Biaya - Kapasitas untuk menghasilkan pendapatan melalui penyediaan layanan
- Pengakuan dan Dukungan Pemerintah - Apresiasi pemerintah atas penyediaan layanan OMS

x

06

INFRASTRUKTUR SEKTORAL:

Dimensi ini terdiri dari 5 sub-dimensi yaitu:

- *Intermediary Support Organizations (ISOs)* dan Pusat Sumber Daya OMS
- Organisasi Lokal Yang Memberikan Grant (dukungan pendanaan)
- Koalisi OMS - Kerjasama di dalam sektor internal OMS
- Pelatihan - Kesempatan pelatihan tersedia bagi OMS
- Kemitraan Intersektoral - Kolaborasi antara OMS dan sektor lainnya

07

CITRA PUBLIK:

Dimensi ini terdiri dari 5 sub-dimensi yaitu:

- Pemberitaan Media - Kehadiran OMS dan aktivitas mereka di media (cetak, televisi, radio dan online),
- Persepsi Masyarakat terhadap OMS
- Persepsi Dunia Usaha terhadap OMS
- Hubungan Masyarakat - Upaya untuk mempromosikan citra dan aktivitas organisasi
- Peraturan Internal Organisasi - Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

Peringkat Penilaian

Penjelasan Skor 1 - 7

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **MENINGKAT** secara signifikan dengan praktik-praktik/kebijakan-kebijakan yang ada. Meskipun reformasi atau perkembangan yang diperlukan mungkin belum tercapai, namun komunitas OMS mengakui perlunya perkembangan/pembaruan dan **MEMILIKI RENCANA** serta **KEMAMPUAN** untuk mencapai hal tersebut.

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **MENINGKAT** dengan praktik-praktik/ kebijakan yang ada. Komunitas OMS **MENUNJUKKAN KOMITMEN** untuk mengejar atau mencapai perubahan dan mengembangkan profesionalisme di bidang ini.

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **CENDERUNG** meningkat dengan praktik-praktik/ kebijakan yang ada, atau adanya komitmen yang signifikan untuk mengembangkan aspek tersebut.

Keberlanjutan sektor masyarakat sipil **SECARA MINIMAL** dipengaruhi oleh praktik-praktik/ kebijakan yang ada. Kemajuan dapat terhambat oleh ekonomi yang stagnan, pemerintah yang pasif, media yang tidak tertarik, atau adanya komunitas aktivis yang punya kemauan namun tidak berpengalaman.

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **AGAK TERHAMBAT** oleh praktik-praktik/kebijakan yang ada. Kemajuan dapat terhambat oleh kontraksi ekonomi (menurunnya kegiatan ekonomi), pemimpin yang otoriter dan pemerintahan yang terpusat, media yang dikendalikan dan reaksioner, atau rendahnya tingkat kapasitas, kehendak/kemauan, atau ketertarikan yang berasal dari sebagai komunitas OMS sendiri.

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **TERHAMBAT** oleh praktik-praktik/kebijakan yang ada. Sebuah lingkungan yang tidak bersahabat, dengan kapasitas dan dukungan publik yang rendah sehingga dapat menghambat pertumbuhan sektor OMS.

Keberlanjutan pada sektor masyarakat sipil **TERHAMBAT SECARA SIGNIFIKAN** oleh praktik praktik/kebijakan yang ada, umumnya sebagai akibat dari pemerintahan yang otoriter yang secara agresif menentang perkembangan OMS yang independen.

Skala Penilaian

Berdasarkan Kategori



**keberlanjutan
Meningkat:**

1-3



**Keberlanjutan
Berkembang:**

3,1-5



**Keberlanjutan
Berkembang:**

5,1-7

Penilaian Untuk Perubahan

Penilaian berangkat dari SKOR tahun sebelumnya. Mengingat CSOSI ditiadakan pada tahun 2022, maka proses penilaian untuk CSOSI tahun 2023 merujuk kepada penilaian dua tahun sebelumnya, yakni CSOSI tahun 2021.

Perubahan diperkenankan hanya berkisar pada 0,1- 0,3 di dalam situasi perubahan lebih baik (skor mengecil), atau lebih buruk (skor membesar). Sebagai contoh:

Makna perubahan tersebut adalah:

0,1

**Perubahan
moderat**

0,2

**Perubahan
signifikan**

0,3

**Perubahan
dahsyat & sering
tak terduga**

Proses Penilaian Dimensi

Jika merujuk pada CSOSI 2021, adakah perubahan yang terjadi dibanding tahun 2023? Berikan contoh dan informasi yang menjelaskan tren perubahan yang diamati (kenaikan atau penurunan) yang didukung oleh fakta dan data.

Bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi?

Apa faktor-faktor pendorong perubahan tersebut dan apa tantangannya?

Pengisian skor masing-masing dimensi dengan mengacu pada petunjuk pengisian skor untuk perubahan tambahan.



KEBERLANJUTAN OMS SECARA KESELURUHAN: 3,9

| <i>Tahun</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2023</i> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lingkungan Hukum | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| Kapasitas Organisasi | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Kemampuan Finansial | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| Advokasi | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
| Penyediaan Layanan | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| Infrastruktur Sektoral | 4,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Citra Publik | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

Secara keseluruhan, Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil pada tahun 2023 berada pada posisi yang sama dengan dua tahun sebelumnya, dengan skor 3,9. Jadi secara keseluruhan, posisi keberlanjutan OMS Indonesia berada pada tingkat keberlanjutan *berkembang*.

Meski tidak berubah dengan nilai keseluruhan periode sebelumnya, namun dilihat dari dimensi-dimensi yang ada, terjadi peningkatan dan penurunan pada beberapa dimensi.

Di tahun 2023, dampak pandemi Covid-19 masih sangat terasa, meskipun secara umum sudah dalam proses pemulihan. Beberapa sektor ekonomi mengalami pelambatan pemulihan, meskipun secara nasional, kondisi ekonomi Indonesia cenderung stabil.

Di tengah suasana seperti itu, ekosistem OMS juga terdampak secara negatif sebagai akibat dari kecenderungan pemerintah untuk menggenjot iklim investasi. Indeks dimensi lingkungan hukum menurun, dari 4,7 pada tahun 2021 menjadi 4,8 pada tahun 2023 ini.

Undang-undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap berkontribusi memperburuk lingkungan hukum OMS sehingga mempersempit ruang gerak masyarakat sipil. Banyaknya kasus yang menimpa para aktivis dan OMS menjadi indikator penting kemunduran itu. Sepanjang 2023 misalnya, di samping beberapa kasus pidana UU ITE, Amnesty Internasional juga mencatat terdapat 128 aktivis HAM yang ditangkap, 96 mengalami intimidasi/serangan fisik, 41 orang dikriminalisasi, 3 kasus percobaan pembunuhan, dan 1 kasus serangan terhadap lembaga pembela HAM. Sementara itu, Komnas Perempuan juga menyebutkan dalam Laporan Tahunan 2023, bahwa tercatat 7 laporan kekerasan terhadap Perempuan pembela HAM. Apalagi, muncul konteks baru di tahun 2023, yakni secara resmi Indonesia menjadi anggota tetap FATF (*Financial Action Task Force*) yang dikhawatirkan membawa konsekuensi pengetatan pengawasan transaksi keuangan dan aliran dana kepada ormas.

2

Penurunan skor pada dimensi lingkungan hukum tersebut berbanding terbalik terhadap naiknya skor indeks dimensi advokasi. Skor dimensi advokasi saat ini naik menjadi 3,0. Pada dua tahun sebelumnya, skor untuk dimensi ini adalah 3,1.

Ini juga menandai perubahan status posisi dimensi advokasi dari kategori “berkembang” menjadi kategori “meningkat.” Skor ini menjadi skor terbaik sepanjang penilaian CSO *Sustainability Index* sejak tahun 2015, dan untuk pertama kalinya salah satu dari tujuh dimensi CSOSI yang berada di level kategori “meningkat.”

Di tingkat nasional misalnya, agenda advokasi melalui strategi lobi dan audiensi yang dilakukan oleh berbagai OMS dan jaringan OMS, serta masih didukung dengan strategi lain baik aksi turun ke jalan, pembangunan opini publik melalui media mainstream dan media anti-mainstream, juga mencapai banyak kemajuan sepanjang 2023.

Sebagai misal, Rancangan Undang-undang (RUU) PPRT telah “mengendap” di DPR RI selama hampir 19 tahun sejak diusulkan, berhasil masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Juga usulan amandemen Undang-

undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mulai direspons.

Perkembangan baru yang cukup menarik adalah pada dimensi kemampuan finansial OMS, yakni upaya diversifikasi sumber daya yang sudah mulai menampakkan hasilnya.

Diversifikasi pendanaan ini menjadi salah satu strategi kunci bagi OMS untuk menjaga keberlanjutan program-programnya. Melalui diversifikasi ini, OMS dapat mengurangi risiko ketergantungan pada sumber pendanaan tunggal, terutama sumber pendanaan donor luar negeri.

Diversifikasi pendanaan memang mulai dikembangkan oleh OMS Indonesia, namun hasilnya masih terbatas. Hasil survei Konsil LSM dan INFID tahun 2023 menunjukkan bahwa 361 OMS dari 509 OMS partisipan survei sudah mulai memiliki diversifikasi pendanaan, sementara 129 OMS hanya memiliki 1 sumber dana.

Dengan menurunnya dukungan pendanaan donor luar negeri, maka diversifikasi sumber pendanaan lokal (*domestic resources*) menjadi hal penting. Beberapa model pendanaan sudah mulai menjadi perhatian, seperti dana CSR, dan model *platform crowdfunding* (urun dana publik melalui *platform digital*).

Disamping skema hibah, pemerintah juga menyediakan sumber pendanaan melalui Dana Bantuan Hukum dan Swakelola Tipe III. Pemerintah mengucurkan dana bantuan hukum sepanjang 2023 sebesar Rp 56,3 miliar untuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Kemenkumham melalui BPHN menyalurkan dana bantuan hukum baik kepada OBH untuk bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi. Sumber pendanaan pemerintah lainnya yang potensial bagi OMS adalah melalui Swakelola Tipe III yang tersedia di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD), meskipun secara proporsi masih sangat kecil.

Salah satu dimensi yang naik peringkat pada tahun 2023 ini adalah dimensi penyediaan layanan, dari 3,4 tahun 2021 menjadi 3,3 tahun 2023.

Bentuk layanan yang disediakan oleh OMS masih tetap sama, namun mengalami penguatan karena diversifikasi metode. Beberapa bentuk layanan bahkan mengalami *monetisasi* untuk mendukung penguatan organisasi, seperti layanan konseling daring, layanan hukum daring, layanan konsultasi kelompok daring, layanan konsultasi kesehatan daring, layanan pelatihan daring, konsultasi bisnis/usaha, dan seterusnya.

Tren *hybrid training* mulai populer di beragam organisasi, salah satunya karena faktor Covid-19. Pasca covid, model ini masih digunakan karena

ternyata mampu memperluas jangkauan layanan dan menyiasati keterbatasan dana.

Upaya diversifikasi pendanaan dalam rangka keberlanjutan penyediaan layanan OMS juga dilakukan oleh banyak OMS, seperti mulai mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Misalnya, beberapa organisasi yang bergerak pada isu ketahanan ekonomi, melalui *Credit Union* (CU) atau koperasi. Juga layanan kesehatan berbayar yang dilakukan oleh beberapa OMS di bidang kesehatan.

Dalam dimensi citra publik, meskipun secara keseluruhan skor indeksnya cenderung stagnan, namun ada beberapa hal menarik yang patut dicatat, yakni meningkatnya rekognisi dan apresiasi terhadap kinerja OMS.

Pada sektor tertentu, secara umum persepsi pemerintah terhadap OMS cukup baik. Misalnya, dalam penanganan Covid 19, pemerintah memberikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, di antaranya adalah kepada 30 LSM dan tujuh organisasi keagamaan. Dalam upaya perlindungan anak, KPAI memberikan penghargaan kepada LSM JARAK karena dinilai memiliki dedikasi tinggi terhadap penghapusan pekerja anak. Dalam pelestarian lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan Kalpataru dalam kategori “Penyelamat Lingkungan” kepada tiga LSM, yakni Perkumpulan Pengelola Hutan Adat Dayak Abay Sembuak, Kalimantan Utara (Kategori Penyelamat Lingkungan), Yayasan Ulin, Kalimantan Timur (Kategori Penyelamat Lingkungan), dan Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) Damaran Baru, Aceh (Kategori Penyelamat Lingkungan). Di tingkat daerah, pemerintah Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Tabalong juga memberikan penghargaan kepada OMS yang aktif mengawal pembangunan daerah.

Di luar dimensi lingkungan hukum yang menurun, dan dimensi advokasi dan penyediaan layanan yang meningkat, dimensi-dimensi lain tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, secara keseluruhan, Indeks Keberlanjutan OMS di Indonesia tahun 2023 berada pada nilai indeks yang sama dengan dua tahun sebelumnya, yakni 3,9. []



DIMENSI 1. LINGKUNGAN HUKUM: 4.8

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|-------|------|------|------|------|
| Skor | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |

5

Mengikuti tren yang telah terjadi sejak tahun 2019, kondisi lingkungan hukum untuk OMS Indonesia berstatus menurun atau lebih buruk dari tahun sebelumnya, meskipun masih tetap dalam kategori keberlanjutan *berkembang* dan cenderung *terhambat*. Skor untuk tahun 2023 adalah 4,8, sementara di tahun 2021 skor untuk lingkungan hukum ini adalah 4,7.

Penurunan ini terutama dilihat dari lahirnya beberapa kebijakan di berbagai daerah yang berpotensi membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Juga karena banyaknya kasus kriminalisasi, intimidasi, dan serangan terhadap aktivis OMS.

Pada sisi regulasi tentang pendaftaran OMS, tidak ada kebijakan baru di tingkat pusat yang secara khusus mengatur tentang pendaftaran OMS, namun masih terjadi diskriminasi terhadap lembaga untuk isu tertentu. Beberapa lembaga pendampingan dan pemberdayaan dalam isu orientasi seksual dan kesetaraan tidak bisa mendaftarkan lembaganya tanpa mengubah atau memanipulasi nama, orientasi, atau tujuan lembaga tersebut.

Di tingkat daerah, muncul beberapa peraturan yang cenderung membatasi

ruang gerak OMS, yakni pembentukan tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan. Ini terjadi di Provinsi Lampung melalui Keputusan Gubernur Lampung dan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatera Barat) yang mengeluarkan Keputusan Bupati No. 220/52/BUP-LK/II/2023.

Diluar nomenklatur pengawasan itu, muncul juga kebijakan pengaturan dan pemberdayaan Ormas. Pergub No.48 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di DKI Jakarta yang berisi soal tata cara dan persyaratan pembuatan dan perpanjangan SKT bagi ormas yang tidak berbadan hukum.

Di Provinsi Jawa Timur lahir juga Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Pergub ini berisi dua poin penting, yakni soal pemberdayaan untuk ormas dan soal integrasi data ormas dalam Sistem Informasi Ormas (Siormas).

Kemenkumham merilis perkembangan data ormas yang mendaftarkan legalitasnya. Tercatat sekitar 568.000 ormas terdaftar di Kemenkumham pada akhir 2023. Kemendagri, melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen POLPUM) juga berupaya melakukan sinkronisasi data ormas melalui aplikasi Siormas, yang mengintegrasikan data ormas yang tidak berbadan hukum, ormas asing dan ormas berbadan hukum.

Pada sisi pelanggaran hukum, kondisi kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi aktivis OMS mengalami penurunan akibat pendekatan represif yang dilakukan oleh aparat negara (terutama polisi), maupun penggunaan beragam metode pembatasan untuk membungkam kritik, mulai dari intimidasi, labeling, kriminalisasi, dst.

Panel Ahli juga menilai bahwa penerapan Undang-undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi turut berkontribusi memperburuk lingkungan hukum OMS sehingga mempersempit ruang gerak masyarakat sipil.

UU ITE juga masih digunakan sebagai alat oleh negara atau mengatasnamakan negara untuk mengkriminalisasi aktivis, seperti kasus Haris Azhar dan Fathia.

UU ITE juga digunakan terhadap Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan di Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah. Daniel dilaporkan oleh Ridwan, warga petambak udang karena komentar Daniel di media sosial pada Juni 2023. Daniel di ditahan polisi pada Kamis, 7 Desember 2023.

Di Banyuwangi, aktivis Budi Pego yang mengadvokasi penolakan tambang

emas dikriminalisasi dengan tuduhan komunisme. Budi yang telah menjalani sidang sejak tahun 2017 divonis 10 bulan penjara, namun ketika mengajukan kasasi ke MA, justru hukumannya bertambah menjadi 4 tahun penjara.

Sepanjang 2023, Amnesty Internasional juga mencatat terdapat 128 aktivis HAM yang ditangkap, 96 mengalami intimidasi/serangan fisik, 41 orang dikriminalisasi, 3 kasus percobaan pembunuhan, dan 1 kasus serangan terhadap lembaga pembela HAM.

Sementara itu, Komnas Perempuan juga menyebutkan dalam Laporan Tahunan 2023, bahwa tercatat 7 laporan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM.

Pada Juli 2023, acara *Queer Advocacy Week* ASEAN yang direncanakan diadakan di Jakarta pada 17-21 Juli 2023, gagal terselenggara karena mendapat kecaman dan ancaman. Salah satunya dari Pemprov DKI Jakarta yang meminta acara tersebut dibatalkan.

Terkait adanya hambatan soal keikutsertaan ormas yang memiliki SKT dalam mengakses pekerjaan melalui Swakelola Tipe III, Kemendagri melalui Ditjen POLPUM menyelenggarakan FGD membahas soal pemberdayaan ormas di mana salah satu pembahasannya adalah soal hambatan keikutsertaan ormas yang memiliki SKT (tidak berbadan hukum) dalam mengakses Swakelola Tipe III.

Swakelola Tipe III adalah mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang memberi ruang kepada OMS untuk menjadi mitra pemerintah. Dalam hal ini salah satu syaratnya adalah memiliki legalitas hukum (AHU). Salah satu hasil dari FGD ini adalah akan disusun surat dari Kemendagri ke LKPP terkait ormas tidak berbadan hukum agar dapat masuk dalam Swakelola Tipe III.

Akses pendanaan lain melalui pemerintah juga terus diupayakan oleh Pokja Dana Abadi OMS yang terdiri dari INFID, Konsil LSM Indonesia, Yayasan Penabulu, KAPAL Perempuan, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), PRAKARSA, TII, dan Remdec, yang terus mengadvokasi Perpres Dana Abadi OMS sejak tahun 2021 sampai tahun 2023. Keberadaan dana Abadi OMS ini dikuatkan oleh Bappenas melalui rancangan awal RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2030 yang secara substansial memuat penguatan masyarakat sipil sebagai salah satu arah pembangunan.

Model pendanaan alternatif terus diupayakan oleh OMS. Salah satunya melalui advokasi yang dilakukan oleh Konsil LSM bekerjasama dengan Indonesia AIDS Coalition (IAC) dengan mendorong alokasi anggaran pemerintah melalui skema Swakelola di enam (6) wilayah uji coba, yakni DKI Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Denpasar, dan Yogyakarta, dengan

dibekali oleh *Technical Officer* (TO) sebagai kepanjangan tangan dari IAC di daerah dan menjembatani kebutuhan OMS HIV dan pemerintah daerah terkait.

Sementara itu, pada sisi kapasitas hukum OMS, upaya-upaya perluasan keahlian hukum di kalangan OMS terus dilakukan oleh beberapa jaringan.

LBH Makassar pada Juli 2023 melakukan diklat paralegal dalam kerangka program *Community System Strengthening and Human Rights* (CSS-HR) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Paralegal ini dilaksanakan di 12 kota se-Indonesia untuk menghasilkan *paralegal officer* (PO) yang akan menjadi wadah/tempat pengaduan bagi penyintas, terutama populasi kunci.

LBH Apik Provinsi NTT menyelenggarakan pelatihan paralegal pada September 2023 untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan, penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat.

Di sisi lain, dana bantuan hukum yang disediakan dan menjadi kebijakan pemerintah masih menyisakan masalah di lapangan. Ada ketimpangan anggaran dalam implementasinya, di mana anggaran untuk pendampingan korban lebih kecil daripada untuk pendampingan tersangka. Menurut temuan Komnas Perempuan, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pendampingan korban adalah Rp750.000,- sementara untuk pendampingan tersangka sebesar Rp5.000.000,-.[]



DIMENSI 2. KAPASITAS ORGANISASI: 3.7

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|-------|------|------|------|------|
| Skor | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |

Skor kapasitas organisasi pada Indeks keberlanjutan OMS Indonesia tahun 2023 berada pada posisi *stagnan* atau tetap pada skor yang sama dengan indeks CSOSI tahun 2021 yakni 3.7. Skor ini masuk dalam kategori keberlanjutan *berkembang*.

Menurut panel ahli CSOSI 2023, terkait kapasitas organisasi ini yang sangat mendasar adalah makin rendahnya kualitas aktivis OMS dalam gerakan, sementara penguatan kapasitas terlalu fokus pada profesionalisme staf terkait tata kelola organisasi, manajemen proyek, serta hal-hal yang terkait administrasi organisasi.

Namun demikian ada banyak upaya lembaga *intermediary* dan forum-forum OMS untuk meningkatkan kapasitas OMS terutama mendukung pemulihan dan ketahanan paska Covid-19. Lembaga-lembaga *intermediary* dan forum-forum OMS yang melakukan upaya peningkatan kapasitas diantaranya USAID-MADANI, Freedom Fund, Indonesia AIDS Coalition (IAC), Lokadaya, Lokanusa, Ford Foundation dan lainnya. Namun upaya OMS Indonesia untuk bangkit pasca pandemi Covid-19 belum mengalami banyak perubahan.

Para ahli juga memberikan apresiasi kepada beberapa lembaga donor dan intermediary yang masih eksis di Indonesia, ditengah menurunnya pendanaan lembaga donor, ada upaya untuk meningkatkan kapasitas OMS untuk kemandirian keuangan OMS. Selama 2023 muncul banyak inisiatif dan inovasi untuk menciptakan model-model penggalangan sumberdaya keuangan maupun non-keuangan. Sebagai contoh, Ford Foundation yang mendukung 16 organisasi mitranya untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan alternatif dari sumberdaya lokal, meskipun belum menunjukkan hasil yang signifikan, namun sudah ada perkembangan.

Isu penguatan kapasitas organisasi untuk OMS pada dasarnya masih menjadi salah satu agenda prioritas sejumlah lembaga-lembaga *intermediary* dan forum-forum OMS sepanjang 2023, dan menjadi strategi untuk mendukung keberlanjutan OMS di Indonesia. Lembaga *Intermediary* USAID-MADANI memberikan bantuan teknis kepada OMS mitra lokal, forum pembelajaran, dan pemerintah daerah; dengan mengundang para ahli dan mentor pembangunan kapasitas di tingkat nasional dan provinsi. Sheep Indonesia juga melakukan penguatan kapasitas OMS lokal di wilayah dampungannya. Selain itu, Indonesia AIDS Coalition (IAC) yang bekerja sama dengan Konsil LSM Indonesia juga memberikan pelatihan advokasi anggaran pemerintah melalui mekanisme Kontrak Sosial (Swakelola) di enam kota sebagai pilot proyek, yakni DKI Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Denpasar, dan Yogyakarta.

10

Sementara itu Freedom Fund yang fokus isunya tentang perdagangan orang, kerja paksa dan perbudakan di sektor perikanan, mendukung peningkatan kapasitas OMS yang bekerja di sektor perikanan, seperti SBMI, DFW, ISB Surabaya, IOJI, dan SAKTI Sulawesi Utara. Pelatihan peningkatan kapasitas tersebut mencakup tata kelola organisasi dan tata kelola program. OMS akar rumput pada umumnya memiliki militansi kerja-kerja pengorganisasian dan pendampingan masyarakat, namun kelemahan sangat terlihat dalam tata kelola organisasi, manajemen staf, perencanaan program, monitoring dan evaluasi, serta pengukuran dampak.

Selain Freedom Fund, peningkatan organisasi serikat buruh/pekerja juga dilakukan oleh Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (FSB KAMIPARHO KSBSI), Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (F-SERBUNDO), dan Serikat HUKATAN. Selain isu tata kelola organisasi, manajemen proyek, dan administrasi keuangan, organisasi serikat buruh/pekerja tersebut juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengurus dan anggota dalam isu tematik, seperti isu gender dan anak, serta kemampuan komunikasi dalam membangun dialog sosial.

Dalam pandangan panel ahli, perbaikan tata kelola organisasi memang

sangat sulit untuk menjadi agenda yang berkelanjutan karena sebagian besar OMS masih sangat “*project base*” di mana penataan staf, termasuk gaji staf dan tata kelola program, masih tergantung dengan kebutuhan proyek dan donor.

Dengan adanya pelatihan-pelatihan, asistensi dari lembaga-lembaga *intermediary*, dan juga pembelajaran dari forum-forum OMS, kapasitas OMS dalam tata kelola program semakin membaik. Hal ini ditandai dengan adanya perencanaan strategis untuk periode waktu yang lebih panjang, dan pengembangan sistem monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak.

Berdasarkan hasil survei Konsil LSM Indonesia dan INFID pada 2023, dari 509 OMS terdapat 455 OMS yang sudah memiliki visi misi organisasi; 497 OMS sudah memiliki rencana kerja; 483 OMS sudah memiliki rencana kerja tahunan; dan 425 OMS sudah memiliki rencana strategis (*renstra*). Kesadaran OMS terhadap adanya *renstra* organisasi didasarkan pada pentingnya tata kelola organisasi yang akuntabel, dan sekaligus dapat membuka kesempatan untuk dukungan kerja sama program dan kolaboratif yang lebih luas. Salah satu kesempatan yang terbuka di tingkat lokal adalah semakin terbukanya kolaborasi dengan sektor bisnis dan pemerintah.

Temuan survei lainnya terkait dengan struktur internal dan *staffing* OMS, yang situasinya tidak jauh berbeda dengan kondisi pada indeks keberlanjutan OMS dua tahun lalu. Pada umumnya OMS memiliki struktur manajemen internal yang fleksibel berdasarkan kebutuhan proyek dan kemampuan sumber daya organisasi. Dari 509 OMS yang berpartisipasi, sebanyak 494 OMS menyatakan memiliki struktur organisasi. Sedangkan terkait mekanisme rapat lembaga, sebanyak 480 OMS menyatakan memiliki mekanisme rapat di lembaganya, dan 461 menyatakan memiliki mekanisme pengawasan. Struktur manajemen OMS ditampilkan dalam bentuk struktur organisasi. Detail untuk pembagian tugas dan wewenang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta SOP Kelembagaan. Dalam survei tersebut diketahui sebanyak 485 OMS menyatakan memiliki Anggaran Dasar, dan ada 475 OMS dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam survei mengenai Kondisi Eksisting dan Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia tersebut, ditemukan juga data; sebanyak 374 OMS yang memiliki tenaga ahli di lembaganya, 418 OMS yang memiliki SOP ketenagakerjaan/karyawan, dan 429 OMS yang memiliki mekanisme relawan/*volunteer*. Adapun dari sisi peningkatan sumber daya manusia (SDM), sebanyak 458 OMS memiliki rencana peningkatan SDM di lembaganya dan sebanyak 312 OMS menyatakan memiliki mekanisme keamanan untuk stafnya.

Dalam sisi peningkatan kapasitas SDM di OMS terdapat upaya-upaya

OMS untuk meningkatkan kapasitas organisasi anggotanya, seperti yang dilakukan oleh YAPPIKA, Lokadaya, dan INFID. YAPPIKA melaksanakan pelatihan internal tentang *Emergency Fast Action and Support Team* (EFAST) agar tim YAPPIKA-ActionAid dapat melaksanakan program tanggap darurat yang berkualitas, dan menggunakan pendekatan berbasis HAM yang mengedepankan martabat dan partisipasi masyarakat terdampak. Sementara itu INFID yang bekerja sama dengan *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) menyelenggarakan Sekolah Online dengan tema “Pelatihan Penggalangan Dana melalui Penyusunan Proposal” sebagai sarana untuk penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, terutama Anggota INFID yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia.

Peningkatan kapasitas anggota juga dilakukan oleh Lokadaya bekerja sama dengan *The Canada Fund for Local Initiatives* (CFLI) dengan sasaran 212 OMS anggota Lokadaya. Lokadaya menyelenggarakan dua tema *serial training online*, yaitu pelatihan kapasitas respons kebencanaan; dan pelatihan kapasitas akses sumber pendanaan pemerintah melalui skema Swakelola Tipe III.

Masih berdasarkan hasil survei yang sama oleh Konsil LSM Indonesia dan INFID, tenaga ahli di internal OMS juga telah berkembang; dan tersedia di lebih dari 374 OMS. Keahlian para tenaga ahli OMS sangat beragam, seperti keahlian tata kelola organisasi, desain dan manajemen program, pengembangan *platform* digital, pengembangan *safeguarding*, peningkatan kapasitas lobi dan advokasi, serta *fundraising*.

Di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan kebutuhan mendasar di era digital saat ini, sebagian besar OMS telah menyadari pentingnya pemanfaatan TIK secara maksimal dalam mendukung kerja-kerja organisasi. Meski secara umum penguasaan dan kapasitas OMS dalam pemanfaatan TIK dapat dikatakan belum ahli, namun banyak OMS telah memperluas penggunaan TIK untuk kebutuhan korespondensi, forum pertemuan daring, sarana komunikasi, maupun pengembangan kerja dan layanan organisasi melalui pemanfaatan fitur teknologi dan atau aplikasi khusus, termasuk penggunaan *artificial intelligence*.

Yayasan Sorong Peduli misalnya, mengembangkan aplikasi digital untuk pengaduan masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan oleh DFW Indonesia yang mengembangkan “*National Fishery Center Indonesia*” sebagai *platform* pengaduan pekerja perikanan di Indonesia. LBH dan YAPPIKA juga mulai memanfaatkan teknologi untuk mentransmisikan aktivitas dan penggalangan dana publik melalui e-wallet dan teknologi sejenisnya.

Namun yang masih dominan dimiliki oleh OMS adalah website dan facebook sebagai media untuk *branding* organisasi, informasi kegiatan

program, dan kebutuhan publikasi lainnya. Hasil penelitian Konsil LSM-INFID menunjukkan bahwa, dari 254 dari 509 OMS yang mengikuti survei telah memiliki website lembaga. Sedangkan untuk kepemilikan media sosial sebagai bagian dari pengembangan transmisi informasi, lebih dari 70% memiliki akun Facebook, sementara media sosial lainnya (Instagram, LinkedIn, dan Twitter X) jumlahnya masih lebih sedikit, yakni di bawah 60%.

□



DIMENSI 3. KEMAMPUAN FINANSIAL: 4.5

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|-------|------|------|------|------|
| Skor | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |

14

Indeks kemampuan finansial OMS Indonesia dalam dua tahun terakhir juga tidak mengalami perubahan, masih berada pada skor 4.5 yang artinya berada di situasi *berkembang* namun cenderung *terhambat*.

Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah masih belum optimalnya upaya diversifikasi sumber pendanaan OMS dan penurunan dukungan pendanaan luar negeri pasca Indonesia bergabung dengan G20 pada tahun 2008. Sementara itu, sumber pendanaan lokal potensial seperti dukungan dari perusahaan, lembaga filantropi, ataupun sumber dari dana pemerintah juga belum maksimal diakses oleh OMS.

Meski demikian bukan berarti OMS Indonesia tidak berdaya. Berdasarkan catatan panel ahli, pengalaman dari situasi Covid-19 yang di satu sisi berdampak pada “ketidakberdayaan” OMS; justru telah membangkitkan solidaritas kolektif, yang menjadikan OMS Indonesia mampu bertahan, dan menjadi lebih kreatif dalam penggalangan sumber dana lokal, namun belum berkembang signifikan, terutama dampaknya terhadap terhadap kemandirian keuangan OMS.

Diversifikasi pendanaan menjadi salah satu strategi kunci bagi OMS untuk

kemandirian keuangan dan menjaga keberlanjutan program-programnya. Melalui diversifikasi ini, OMS dapat mengurangi risiko ketergantungan pada sumber pendanaan tunggal, terutama pendanaan dari donor luar negeri. Diversifikasi pendanaan memang mulai dikembangkan oleh OMS Indonesia, namun hasilnya masih terbatas. Hasil survei Konsil LSM dan INFID tahun 2023 juga menunjukkan bahwa dari 509 OMS partisipan survei, 361 sudah mulai memiliki diversifikasi pendanaan, sementara 129 OMS lainnya hanya memiliki 1 sumber dana.

Dengan menurunnya dukungan pendanaan donor luar negeri, maka diversifikasi sumber pendanaan lokal menjadi hal penting. Beberapa model pendanaan sudah mulai menjadi perhatian, seperti dana CSR; dan model *platform crowdfunding* (urun dana publik melalui *platform* digital). Misalnya saja, sekitar 33 organisasi lokal mitra USAID-MADANI, sampai dengan tahun 2023 berhasil mengembangkan alternatif sumber pendanaan lokal yang beragam, mulai dari skema Swakelola (pendanaan dari pemerintah), bisnis sosial, dan lainnya. Secara kolektif penggalangan alternatif sumber pendanaan lokal ini mencapai angka 17 milyar rupiah.

Yayasan Kusuma Buana (YKB), salah satu OMS yang berfokus pada masalah kesehatan dengan mengutamakan upaya preventif dan promosi, memiliki sumber pendanaan lebih dari empat sumber, mulai dari donor, sektor swasta, *fundraising*, pemerintah, dan individu. Lembaga lainnya dengan lebih dari tiga sumber pendanaan adalah Yayasan Kasih Globalindo, yang mendapatkan pendanaan dari donor, subsidi silang biaya pasien, donasi/dana sosial, penelitian, dan sumber dari pemerintah. Diversifikasi paling banyak dicontohkan oleh lembaga Kota Kita, organisasi nirlaba dengan keahlian perencanaan kota dan partisipasi warga dalam perancangan dan pengembangan kota (Panduan Model Pendanaan yang Berkelanjutan bagi OMS HIV AIDS di Indonesia). Sampai tahun 2022 Kota Kita memiliki 9 sumber pendanaan, yaitu; *Private consulting, Research university, Private Foundation, International Public Corporation, Social Enterprise, International Research Organization, UN Agency*, lembaga non-profit internasional dan nasional.

Disamping skema hibah, pemerintah juga menyediakan sumber pendanaan melalui dana Bantuan Hukum dan Swakelola Tipe III. Sepanjang 2023, pemerintah mengucurkan dana bantuan hukum sebesar Rp 56,3 miliar untuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Kemenkumham melalui BPHN juga menyalurkan dana bantuan hukum kepada OBH, baik untuk bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi

Sumber pendanaan pemerintah lainnya yang potensial bagi OMS adalah melalui Swakelola Tipe III yang tersedia di Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah. Namun jumlahnya masih sangat kecil. Pada tahun 2023 Konsil LSM bekerjasama dengan IAC melakukan penelitian terkait kesiapan pemerintah dalam implementasi kebijakan Swakelola Tipe III di Indonesia: dengan studi kasus di empat wilayah: (Kabupaten Kediri, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, dan Kota Denpasar). Dari penelitian ini ditemukan data; bahwa total RUP (Rencana Umum Pengadaan) dalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang diakses pada 10 Oktober 2023 mencapai Rp1,131,7 triliun, dengan jumlah paket 5.302.171 paket. Alokasi melalui penyedia sebesar 775,5 triliun atau sebesar 68,5 % dari total RUP, dan melalui swakelola sebesar 356,2 triliun atau sebesar 31,5 persen. Dari kajian ini juga ditemukan banyak *miss-tagging*. Artinya, tidak semua paket yang di-tag sebagai paket Swakelola Tipe III adalah paket yang ideal dikerjakan oleh OMS, seperti pekerjaan konstruksi, operasional pemerintah, pembelian barang, hibah, dan jasa pihak ketiga. Kelima jenis pekerjaan ini merata dilakukan di semua level pemerintahan, baik di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten.

Inovasi diversifikasi pendanaan juga dilakukan oleh beberapa OMS bekerjasama dengan berbagai lembaga lokal. PKBI Kota Bandung bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Kota Bandung mengumpulkan dan mendistribusikan dana untuk pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Bandung. Menurut para ahli, lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS telah terbuka untuk bekerjasama dengan OMS dalam mendukung kerja-kerja kemanusiaan, tidak hanya yang di Bandung, namun juga BAZNAS secara nasional. Lembaga IKa dan Komnas Perempuan mengadakan *Give Back Sale* (GBS) Pundi Perempuan, yakni penggalangan dana publik melalui penjualan barang. Sementara itu, pendanaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), belum banyak berkembang untuk mendukung OMS. Perusahaan Sony Music Entertainment Indonesia memberikan pendanaan kepada lembaga IKa dalam rangka memperkuat upaya memerangi kekerasan berbasis gender di Indonesia. Pendanaan merupakan bagian dari *Global Social Justice Fund Initiative* yang diikuti oleh Sony Music Entertainment Indonesia.

Sumber pendanaan potensial lainnya adalah *crowdfunding*, terutama melalui *platform* Kitabisa.com atau Benihbaik.com. Sampai akhir tahun 2023 misalnya, Kitabisa melaporkan sudah bermitra dengan lebih dari 1000 OMS, 290 Rumah Sakit, 150 CSR, 7 juta vendor dan melibatkan lebih dari 1.900 *influencers*. LBH dan YAPPIKA secara mandiri juga melakukan model *crowdfunding* melalui website organisasi masing-masing. Sementara itu, kelompok serikat buruh/pekerja telah memperbaiki sistem iuran anggota sebagai sumber pendanaan utama gerakan serikat buruh/pekerja. Salah satu bentuk perbaikan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan

perusahaan secara langsung, yang biasanya juga tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Misalnya penarikan otomatis 1% gaji bulanan untuk iuran anggota dengan menggunakan *check-out system*.

Sedangkan dari segi kepemilikan aset, terdapat 327 OMS yang menyatakan memiliki aset sendiri. Terkait keberlanjutan OMS, hasil survei menunjukkan ada 300 OMS yang memiliki *tools* keberlanjutan organisasi, sementara yang memiliki unit usaha sendiri organisasi sebanyak 166 OMS.

Pada aspek manajemen keuangan OMS, dari 509 OMS yang berpartisipasi dalam survei, hanya 303 OMS yang menyatakan memiliki SOP pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagian besar OMS, terutama yang beroperasi di tingkat nasional dan provinsi, mampu mempraktikkan pengelolaan keuangan yang baik. Namun demikian, organisasi yang lebih kecil kerap mengalami kekurangan kapasitas staf serta perangkat yang mendukung tata kelola keuangan. Beberapa OMS secara teratur mempublikasikan laporan keuangan mereka secara *online*. Sebuah riset yang memanfaatkan akses keterbukaan data laporan keuangan menunjukkan bahwa LSM-LSM di Lombok cenderung memiliki tingkat interval akuntabilitas yang masih sangat kurang, yakni hanya sebesar 2,8%. Sedangkan berdasarkan ISAK 35 pada posisi laporan keuangan LSM, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset *netto*, laporan perubahan arus kas dan CALK berada pada angka 0% karena belum ditemukan lembaga yang membuat laporan keuangannya berdasarkan ISAK 35 di websitenya.

Keterbukaan laporan OMS masih cukup baik dalam pelaporan program, dan dapat diakses di laman media maupun akun media sosial organisasi. Hal ini terkonfirmasi dalam pertemuan panel ahli, bahwa salah satu hal penting bentuk dari akuntabilitas keuangan adalah audit publik. Namun yang menjadi tantangan utamanya adalah keterbatasan dana untuk membayar auditor independen. []



DIMENSI 4. ADVOKASI: 3.0

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|-------|------|------|------|------|
| Skor | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |

18

Dimensi Advokasi OMS Indonesia memiliki tren meningkat setiap tahunnya, dari sebelumnya 3,2 dan 3,1 pada tahun 2020 dan 2021, menjadi 3,0 pada tahun 2023.

Hal ini juga menandai perubahan status posisi dimensi advokasi dari kategori *berkembang* menjadi kategori *meningkat*. Skor ini menjadi skor terbaik sepanjang penilaian Indeks Keberlanjutan OMS sejak tahun 2015, dan untuk yang pertama salah satu dari tujuh dimensi CSOSI yang berada di level kategori *meningkat*.

Tren peningkatan pada dimensi advokasi sangat dipengaruhi oleh konsistensi OMS dalam kerja-kerja advokasi dan pendekatan yang progresif, dan keberhasilan-keberhasilan agenda advokasi di tingkat nasional maupun maupun lokal. Misalnya saja dalam kerja-kerja advokasi kebijakan, pendekatan lobi atau dialog antar pemangku kepentingan telah banyak dipilih sebagai strategi oleh OMS dan mencatatkan beberapa keberhasilan.

Menurut penilaian para ahli, tren meningkatnya dimensi advokasi, di satu sisi memang cukup baik untuk menggambarkan konsistensi OMS, namun di sisi lain juga bisa diartikan masih banyaknya pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kondisi ruang sipil yang menyempit, dan kondisi-kondisi lainnya, sehingga OMS masih perlu bekerja keras untuk melakukan advokasi.

Di Aceh, LSM Flower Aceh menggunakan pendekatan audiensi kepada Dinas Pendidikan Dayah terkait pentingnya pelatihan kesehatan bagi guru-guru di Dayah (pesantren). Di Surabaya, koalisi 18 LSM berhasil meyakinkan DPRD kota Surabaya untuk mengubah perda penyelenggaraan perlindungan anak menjadi Perda Inisiatif Kota Ramah Anak (*child-friendly city initiatives-CFCI*). Mereka juga berhasil mendorong DPRD Surabaya untuk melibatkan 18 LSM dalam pansus perlindungan anak. Di Garut LSM Citra Bina Bangsa (CBB) melakukan audiensi dengan bupati Garut untuk memaparkan rencana program Sekolah Gunung dan Konservasi Alam “Jagawana Talaga Bodas”. Sekolah ini fokus pada masalah konservasi ekosistem esensial dengan konsep *agroforestry*.

Pada level provinsi, Forum Multi Stakeholder Jawa Timur melalui dukungan program Harmoni INFID melakukan peran strategis dan ruang kolaborasi, komitmen, pengetahuan dan pemahaman tentang penanganan deportan dan returnee perempuan dan anak di daerah. Forum ini berhasil mengadvokasi penandatanganan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur No 188/451/kpts/013/2022 pada 10 Juli 2022 tentang pengesahan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Di tingkat nasional, kemajuan advokasi melalui strategi lobi dan audiensi, serta masih didukung dengan strategi lain baik aksi turun ke jalan, pembangunan opini publik melalui media mainstream dan media anti-mainstream, juga mencapai banyak kemajuan sepanjang 2023. Dua Rancangan Undang-undang (RUU) yang telah menjadi agenda panjang koalisi OMS berhasil masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. RUU tersebut adalah {RUU PPRT} dan amandemen {UU ITE}. RUU PPRT telah “mengendap” di DPR RI selama hampir 19 tahun sejak diusulkan. Selama 19 tahun berbagai kegiatan dilakukan untuk mengarusutamakan pentingnya RUU PPRT baik melalui dialog, lobi dan aksi turun ke jalan. Setelah melalui waktu yang panjang, akhirnya RUU masuk Prolegnas sebagai RUU inisiatif DPR. Namun demikian, perjalanan RUU PPRT ini masih sangat panjang karena RUU ini harus dibahas bersama pemerintah dan komisi terkait sampai akhirnya bisa disahkan menjadi undang-undang.

Advokasikebijakainlainnyaditingkatnasionaladalahdoronganpembentukan aturan turunan Undang-undang nomor 19/1961 tentang Pengadaan Uang dan Barang (PUB) dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 8/2021 tentang Penyelenggaraan PUB, yang dilakukan oleh Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan. Aliansi ini melibatkan lebih dari 100 OMS yang bergerak di bidang penggalangan dana atau filantropi. Poin penting yang menjadi catatan Aliansi adalah soal hambatan partisipasi warga oleh regulasi PUB, dan adanya potensi kriminalisasi lembaga sosial dan

filantropi yang terlibat dalam penanganan bencana, sehingga menyulitkan mereka untuk mendukung program-program jangka panjang, termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kelompok serikat pekerja/serikat buruh juga melakukan advokasi RUU kesejahteraan ibu dan anak (KIA), dengan melakukan lobi ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan mereka adalah tuntutan hak cuti enam bulan bagi perempuan yang melahirkan dan 40 hari bagi suami. Namun upaya ini masih menemui jalan buntu, karena adanya penolakan dari kelompok pengusaha.

Koalisi lainnya adalah Pokja Dana Abadi OMS. Sejak Februari 2021 mereka telah melakukan serangkaian pertemuan, diskusi, kajian, survei untuk mendorong lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Dana Abadi OMS. Sepanjang tahun 2023, Pokja DA OMS melalui dukungan dari DFAT Inklusi melakukan serangkaian kegiatan advokasi lebih lanjut, seperti studi, audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan juga *public hearing*.

Advokasi OMS tidak hanya pada isu kebijakan-kebijakan yang sifatnya makro. Pada level teknis di daerah juga masih dilakukan advokasi melalui diskusi, lobi dan kajian-kajian sebagai strategi advokasi berbasis bukti. Hasil FGD dengan OMS dari tiga wilayah Indonesia, menunjukkan kerjasama advokasi yang lebih spesifik pada isu-isu berbasis lokal. Misalkan saja advokasi anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. OMS melakukan pengawalan anggaran Pendidikan, Kesehatan dan isu khusus terkait anggaran untuk perlindungan Perempuan dan anak, isu lingkungan, dan isu disabilitas. Advokasi pada isu lokal lain yang sangat menarik perhatian nasional adalah penggusuran masyarakat adat di Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. OMS Nasional seperti YLBHI dan Seknas WALHI mengkoordinasikan jaringan OMS nasional dan lokal. Koalisi ini dibagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama yang dipimpin YLBHI fokus pada isu legal wilayah, perlindungan pembelaan hukum terhadap masyarakat yang tergusur, dan bantuan litigasi lainnya, sementara koalisi kedua yang dipimpin Seknas WALHI memobilisasi sumberdaya OMS untuk memberikan bantuan kemanusiaan. []



DIMENSI 5. PENYEDIAAN LAYANAN: 3.3

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|-------|------|------|------|------|
| Skor | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |

21

Dimensi penyediaan layanan OMS terus mengalami peningkatan skor 1 poin sejak 2019. Skor tahun 2023 adalah 3.3, yang artinya berada pada situasi keberlanjutan *berkembang*.

Jenis layanan yang disediakan oleh OMS tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena layanan tersebut melekat pada program yang dijalankan OMS dan bersifat berkelanjutan. Tren peningkatan ini terjadi bukan karena penambahan jenis layanannya, tetapi karena meningkatnya kualitas penyedia layanan. Berdasarkan catatan panel ahli, kondisi penyediaan layanan OMS saat ini berada pada titik inovatif dan inklusif.

Inovatif, karena berhasil mengadopsi metode *daring* dalam penyediaan layanan. Metode *daring* dalam penyediaan layanan menjadikan layanan lebih efektif, karena dapat menyingkat ruang dan waktu serta berbiaya murah. Pada akhirnya OMS dapat menawarkan beragam metode penyediaan layanan, seperti *daring*, *luring*, dan atau perpaduan keduanya (*hybrid*). Pada akhirnya daya jangkauannya pun menjadi semakin meluas.

Inovasi lain yang dilakukan OMS untuk keberlanjutan layanan adalah pengembangan kolaborasi dengan pemerintah. Sebagai contohnya adalah Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) melalui program kesehatan ibu dan

anak MADANI mendampingi 12 organisasi di 12 kabupaten mendorong pelaksanaan empat solusi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), melalui Posyandu Remaja/Kampung Remaja Sehat, Desa Siaga KIBBL dan pendampingan ibu hamil, forum para pihak di tingkat desa dan pendampingan ibu hamil, dan kampung keluarga berkualitas. Solusi penurunan AKI dan AKB tersebut didorong untuk direplikasi oleh pemerintah daerah. Beberapa daerah menyambut upaya baik tersebut dan mengeluarkan kebijakan serta pendanaan untuk replikasi model solusi lokal kesehatan ibu dan anak. Sebagai contohnya adalah Kabupaten Boyolali yang mencanangkan gerakan merawat ibu dan anak (Merbabu) yang sudah menunjukkan hasil setelah diujicobakan di dua desa pada tahun 2022. Kasus AKI di Kabupaten Boyolali menurun, sebelumnya peringkat ke-20 se-provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 menjadi peringkat ke-19.

Layanan bagi individu dengan disabilitas pun juga mengalami peningkatan, OMS melakukan advokasi untuk layanan pemerintah yang ramah disabilitas, seperti posyandu disabilitas, pendekatan inklusif dalam penanganan disabilitas mental, hingga terbentuknya Kelompok Kerja P5H Penyelenggaraan disabilitas mental. Demikian juga layanan HIV terus menguat, Pemerintah berkolaborasi dengan OMS untuk memberikan layanan, seperti menyediakan alat pencegahan, obat pencegah HIV pada populasi kunci dalam usaha mencegah kasus HIV baru, menyediakan tes HIV gratis, ARV dan membuat sistem untuk mencegah dan memonitor *lost to follow up* menuju target 95-95-95.

Layanan yang disediakan oleh OMS masih tetap sama, namun mengalami penguatan karena diversifikasi metode. Bahkan beberapa bentuk layanan mengalami *monetisasi* untuk mendukung penguatan organisasi, seperti layanan konseling, layanan hukum, layanan konsultasi kelompok, layanan konsultasi kesehatan, layanan pelatihan, konsultasi bisnis/usaha, dan seterusnya yang dilakukan secara daring. Perpaduan model *hybrid* salah satunya adalah model pelatihan yang dikembangkan oleh Konsil LSM Indonesia. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, mereka memberikan pelatihan dalam dua tahap dengan metode yang berbeda: pelatihan *luring* untuk memperkuat kapasitas substansi isu, sementara metode pelatihan *daring* digunakan untuk membahas hasilnya.

Demikian juga dengan layanan jasa berbentuk *technical assistance* yang lebih banyak dilakukan secara daring. Beberapa layanan yang masih ajeg disediakan oleh OMS antara lain adalah bidang kesehatan reproduksi, penjangkauan, hukum, pendidikan, penguatan ekonomi perempuan, pendampingan komunitas rentan, penguatan kapasitas organisasi, konseling, dll.

Layanan yang disediakan oleh OMS sebenarnya berbasis kebutuhan

komunitas dan publik; karena ketercapaian dari penyediaan layanan OMS selalu dievaluasi dengan renstra organisasi. Dengan demikian sumber pendanaannya pun sudah teridentifikasi sejak awal. Hanya saja beberapa tahun terakhir ini ketersediaan pendanaan bagi OMS sedang sedang dalam masa krisis.

Tahun 2023 menjadi tahun peringatan bagi ketahanan finansial OMS. Membaiknya status ekonomi Indonesia, juga mendorong OMS melakukan diversifikasi pendanaan. Karena sumber dukungan donor internasional sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Untuk menyalasi kondisi tersebut, beberapa OMS berfokus pada penyediaan layanan konsultasi dan pelatihan tidak berbayar untuk diversifikasi pendanaan organisasi dengan menggunakan metode *daring*, seperti yang dilakukan oleh jaringan Lokadaya, Konsil LSM, Program MADANI, EpiC, dll.

Upaya diversifikasi pendanaan dalam rangka keberlanjutan penyediaan layanan OMS dilakukan oleh banyak OMS dengan cara mengoptimalkan daya yang dimiliki oleh organisasi. Beberapa organisasi yang bergerak pada isu ketahanan ekonomi, melalui *Credit Union* (CU) atau koperasi, membalik strategi pemberdayaan. Jika sebelumnya mereka lebih banyak mendapatkan pendampingan dan penguatan dari OMS, saat ini justru merekalah yang membiayai OMS. Sebagai contohnya adalah dukungan pendanaan yang diberikan *Credit Union* (CU) kepada PERSADA dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2023, dukungan CU kepada organisasi PERSADA sebesar 623.380.500, naik 4% dari tahun sebelumnya sebesar 600.085.000.

Hal yang sama juga dilakukan oleh organisasi buruh, iuran anggota yang sebelumnya dikumpulkan secara manual (ditagih ke setiap anggota), saat ini dikumpulkan melalui *check out system (payroll)* yang dipotong langsung oleh pihak perusahaan, kemudian iurannya disetorkan kepada organisasi buruh. Pengumpulan iuran secara *check out system* biasanya dilakukan ketika di dalam perusahaan sudah ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun di 2023 organisasi buruh telah membuat terobosan dengan mendorong pengumpulan iuran anggota melalui CoS, walaupun belum ada PKB. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah *lobby* dan dialog sosial agar tercipta saling percaya dan saling menghormati satu sama lain

Hal yang sama juga dilakukan oleh PKBI dari tahun ke tahun. Layanan klinik kesehatan berbayar yang mereka kembangkan memberikan subsidi ke gerakan organisasi. OMS juga melakukan penggalangan dana publik, baik dilakukan secara mandiri dengan mengundang konsultan, atau tanpa konsultan, serta bekerja sama dengan *platform online* seperti kitabisa.com, benihbaik.com, dan Narasi newsroom.

Dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan layanan yang disediakan oleh OMS, di antaranya adalah melalui *social contracting*, seperti hibah, pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan IV, serta dana bantuan hukum. Semua itu masih terjadi di tahun 2023. Yang menarik adalah alokasi RUP pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota melalui Swakelola Tipe III di *platform* SIRUP pada tahun 2023 mengalami peningkatan 0,24% dari 0,4% di tahun 2022. Lembaga yang dibentuk negara seperti BAZNAS di tingkat daerah juga mulai mengalokasikan dukungan pendanaan untuk penanganan korban kekerasan, sebagaimana pengalaman yang diceritakan oleh SPEK HAM Surakarta. Demikian juga di akhir 2023, BAZNAS Kota Bandung melakukan penandatanganan PKS dengan PKBI Bandung dalam penanggulangan HIV AIDS. []



DIMENSI 6. INFRASTRUKTUR SEKTORAL: 3.9

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|-------|------|------|------|------|
| Skor | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

25

Dimensi infrastruktur sektoral OMS menunjukkan bahwa skor keberlanjutan tidak berubah atau masih sama dengan tiga tahun sebelumnya, yaitu berada pada situasi keberlanjutan *berkembang*, di angka 3,9.

OMS yang memiliki wilayah kerja nasional berkecenderungan mengambil peran sebagai *Intermediary Support Organization* (ISO) dan pusat sumber daya OMS. Berdasarkan catatan panel ahli, infrastruktur masyarakat sipil cukup berkembang, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan secara keseluruhan.

Beberapa OMS Indonesia yang masih konsisten memberikan hibah kepada OMS lokal di tahun 2023 di antaranya adalah Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) yang secara rutin membuka *call for proposal* dua kali setahun untuk isu layanan dan pendampingan korban kekerasan. Nusantara Fund yang merupakan inisiatif AMAN-KPA dan Walhi memberikan pendanaan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal untuk mitigasi krisis iklim. Yayasan Penabulu menyediakan program hibah kecil (Small Grant Programme/SGP). Yayasan TIFA memberikan dukungan pendanaan bagi OMS pada isu prioritas HAM, tata kelola sumber daya alam, pendalaman inovasi, demokrasi dan gerakan sosial dan tata kelola digital. Yayasan Kurawal memberikan

dukungan kepada individu dan organisasi dimulai sejak tahun 2019 dan tahun 2023 meluncurkan dana cepat tanggap darurat untuk keselamatan aktivis. KEHATI memberikan hibah untuk isu lingkungan hidup kepada OMS dengan lima klaster isu, yaitu: konservasi laut efektif, konservasi hutan dan satwa di Sumatera dan Kalimantan, *blue abadi fund*, serta pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan.

Sebagai pusat sumber daya OMS, Konsil LSM Indonesia memberikan penguatan program *social contracting* untuk OMS HIV di 8 kota. YAPPIKA secara konsisten sejak 2009 melakukan penguatan kapasitas OMS dalam isu advokasi, kampanye, pengorganisasian warga, dan tata kelola organisasi. IAC dengan dukungan dari *The Global Fund* bergerak di isu HIV di 24 wilayah. Penabulu merilis *Civil Society Resource Mobilization* (CSR/M) di awal tahun 2023. Yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mempertautkan seluruh intervensi program dan proyek dari Penabulu dalam kerangka kerja pengelolaan sumber daya organisasi sebagai aset kolektif yang akan didistribusikan, dipertukarkan, dan dimodifikasi/diproduksi ulang bagi seluruh elemen masyarakat sipil Indonesia.

Lokadaya yang merupakan jejaring terbuka OMS di Indonesia mengalami peningkatan jumlah anggota, dari 62 organisasi di tahun 2021 menjadi 261 organisasi di tahun 2023. Lokadaya terus memperkuat pengetahuan OMS, tahun 2023 fokus pada mobilisasi sumber pendanaan melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan mobilisasi peningkatan sumber daya lokal berbasis pengelolaan risiko bencana dengan dukungan dari CFLI/FCIL. Yayasan Spiritia yang fokus pada isu HIV dan TB bekerja di 32 provinsi dengan 20 mitra OMS lokal. Pusat sumber daya OMS juga disediakan oleh OMS yang bersifat jaringan nasional, seperti PKBI, JIP, OPSI, IPPI, Walhi, INFID, KPI, FITRA, PPSW, Kapal Perempuan, dll.

Koalisi OMS baru yang terbentuk di tahun 2023 cenderung untuk mengawal demokrasi Indonesia, seperti Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM. Namun di tahun 2023 juga terdapat koalisi OMS lama yang masih fokus pada isu advokasi kebijakan, seperti Aliansi PRT untuk mendorong advokasi RUU PPRT, Koalisi Serius untuk Revisi UU ITE, Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan untuk mendorong RUU Penyelenggaraan Sumbangan, Pokja Dana Abadi OMS, dan Koalisi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) untuk advokasi hak KBB bagi setiap warga Indonesia. Sementara di tingkat daerah, koalisi OMS dibangun untuk mendorong penanganan kasus, Di Kalimantan Tengah, koalisi LSM yang terdiri dari WALHI Kalimantan Tengah, *Save Our Borneo* (SOB), dan LBH Palangkaraya melaporkan empat perusahaan yang terlibat dalam kebakaran lahan di Kalimantan Tengah.

Fokus penguatan kapasitas OMS tahun 2023 adalah isu keberlanjutan

organisasi. Status ekonomi Indonesia yang menjadi *upper middle-income* telah mengubah fokus OMS untuk segera menata diri. Dalam penanggulangan HIV AIDS, penguatan keberlanjutan organisasi bertema *social contracting*, dilaksanakan oleh Konsil LSM Indonesia bersama dengan Indonesia AIDS Coalition (IAC) di 8 kota. FHI 360 melalui EpiC memfasilitasi forum *sharing* melakukan pengalaman dana organisasi untuk diramu menjadi panduan diversifikasi pendanaan bagi OMS HIV. Pada Akhir 2023, IAC dalam upaya memperkuat perspektif komunitas dalam penanggulangan HIV AIDS mengadakan kegiatan *Community Transformation Conference* (CTC) yang diikuti oleh 450 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu topik workshop dalam kegiatan tersebut adalah keberlanjutan OMS HIV.

Penguatan kapasitas OMS untuk mengoptimalkan pendanaan lokal juga dilakukan oleh program MADANI yang merupakan program lanjutan sejak 2021 dengan menysasar 38 OMS di 6 provinsi. YAPPIKA memberikan pelatihan *Result-Based Management* (RBM) untuk Masyarakat adat di Papua. Yayasan Satunama merilis program pelatihan pengembangan kelembagaan OMS dengan tema "*Mobilization Support Game Changer: Graduation*". Penguatan kapasitas bagi OMS muda juga dilakukan oleh Ika bekerjasama dengan INFID dalam tema keberlanjutan OMS di Indonesia, yang membahas tentang akuntabilitas, keberlanjutan, dan visibilitas OMS.

Kemitraan lintas sektor menjadi wujud dukungan nyata OMS dalam mencapai pembangunan nasional berkelanjutan. Peran OMS memiliki hubungan yang berimbang dan timbal balik dengan sektor swasta dan negara. Bentuk kemitraan OMS dan *private sector* pada tahun 2023 misalnya kerjasama antara *Principal Foundation* (PT Principal Asset Management) dengan Yayasan Bulir Padi dalam kegiatan "*Volunteering Day Activity*" bagi anak muda dan komunitas di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Selain itu, ada juga kemitraan antara *Sony Music Entertainment Indonesia* dengan IKA dalam melakukan penggalangan dana untuk memerangi kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Kemitraan OMS dengan negara, dalam hal ini pemerintah, terjalin di beberapa sektor, di antaranya adalah kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Pada sektor kesehatan, terbangun kemitraan antara pemerintah kota dengan OMS dalam penanggulangan HIV AIDS. Di Bogor, pemkot Bogor menandatangani MoU dengan koalisi OMS HIV yang terdiri dari JIP, Female Plus, LEKAS, YBPB, Women Voice da Sahira. Di Ambon, pemkot Ambon melakukan kemitraan dengan Yayasan Pelangi Maluku. Di Yogyakarta, pemkot Yogyakarta menandatangani MoU dengan Yayasan Victory Plus.

Sementara untuk sektor pendidikan, Yayasan Sulinama bersinergi dengan pemkab Nagekeo Provinsi NTT menerapkan transisi bahasa ibu ke bahasa

Indonesia. Pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, Kemitraan melakukan penandatanganan MoU dengan LKPP RI. Masih dalam lingkup yang sama, yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP RI menandatangani MoU dengan *Indonesia Corruption Watch*. Pada sektor lingkungan, Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerjasama dengan tiga LSM (WWF Indonesia, Yayasan Jejak Pulang, dan The Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSSF)) untuk membangun IKN dengan konsep hutan berkelanjutan. Di NTB, Pemkab Dompu bekerjasama dengan OMS Islamic Relief Indonesia untuk mengembalikan fungsi hutan. []



DIMENSI 7. CITRA PUBLIK: 4.0

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|-------|------|------|------|------|
| Skor | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Dimensi citra publik OMS tidak mengalami perubahan skor sejak 2020, masih tetap di angka 4,0, yang artinya berada pada situasi keberlanjutan *berkembang*.

Liputan media terhadap kerja-kerja OMS tidak bisa dilepaskan dari ideologi pemilik media. Sehingga publikasinya pun akan mengikuti nilai pasar. Strategi yang dilakukan oleh OMS adalah melakukan kolaborasi dalam liputan dan atau menginternalisasi isu-isu yang menjadi fokus kerja OMS kepada jurnalis. Tapi dengan berlapisnya tingkat khalayak maka tidak semua bisa dijangkau dengan media, walaupun media sudah melakukan konvergensi. Berdasarkan catatan panel ahli, citra publik OMS mengalami perkembangan, namun tidak signifikan dan masih pada tataran kepentingan wilayah kerja masing-masing.

OMS di mata media masih mendapatkan tempat baik. Era konvergensi media dapat menjadi daya dukung dan daya jangkau untuk menaikkan berita seluas-luasnya. Hal ini misalnya terlihat dalam pemberitaan advokasi RUU PPRT. Selain surat kabar online, beberapa media televisi juga membuat ulangan tayangan berita di saluran youtube mereka, seperti Metro TV, Kompas TV, CNN Indonesia, dan ANTARA TV. Saluran media lainnya yang

turut meramaikan advokasi RUU PPRT adalah DPR RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sekretariat Presiden, dan Fakultas Hukum UGM.

Namun, citra OMS di masyarakat terus berkembang, baik yang merupakan dampak dari pemberitaan ataupun kerja langsung mereka di komunitas. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya fokus kerja OMS maupun bentuk OMS di Indonesia. Bagi OMS yang secara umum banyak menerima dukungan pendanaan dari donor internasional, seringkali masyarakat cenderung menanyakan kepada OMS, mereka membawa apa? Atau mau kasih apa? Di sisi lain, masyarakat juga berkecenderungan menyamakan kerja OMS satu dengan yang lainnya. Sebagai contohnya adalah tanggapan negatif *users* pada dua tema Podcast INFID tentang LSM.

Pada isu-isu lain, sebagian masyarakat juga melihat sisi positif dari kegiatan-kegiatan OMS. Misalnya terlihat dalam aksi galang dana LBH Jakarta bertajuk Tegakkan Keadilan Rakyat dan LBH APIK Jakarta dengan tema “Selamatkan Rumah Keadilan Perempuan dan Bagikan Bantuan,” serta “Lindungi Korban Kekerasan” mendapatkan sambutan positif dari publik. Persepsi positif masyarakat terhadap OMS dikuatkan dengan hasil survei Edelman Trust Barometer tahun 2023 berada di angka 69 poin, menguat 1 poin dibandingkan tahun 2021.

30

Secara umum persepsi pemerintah terhadap keterlibatan OMS dalam program-program kemitraan dengan pemerintah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang pemerintah berikan kepada LSM dalam beberapa bidang. Sebagai contoh adalah dalam penanganan Covid 19, pemerintah memberikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi berbagai pihak di antaranya adalah kepada 30 LSM dan 7 organisasi keagamaan. Dalam upaya perlindungan anak, KPAI memberikan penghargaan kepada LSM JARAK karena memiliki dedikasi tinggi terhadap penghapusan pekerja anak. Dalam pelestarian lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan kepada 3 LSM. Dalam program advokasi terbaik diberikan kepada LBH Jakarta. Penghargaan kepada OMS juga terjadi di tingkat daerah, seperti Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Tabalong yang memberikan penghargaan kepada OMS yang aktif mengawal Pembangunan daerah.

Sambutan positif terhadap peran OMS untuk mendukung tujuan pembangunan nasional secara nyata terjadi di tahun 2023. Penghargaan kepada OMS tidak hanya berbentuk memberikan anugerah atau *award*, namun pelibatan OMS dalam derap Pembangunan Indonesia. Sebagai contohnya adalah pelibatan OMS dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang inovasi. Di tingkat ASEAN, beberapa OMS di tingkat nasional, seperti Prakarya dan INFID turut berperan dalam

kegiatan side event Inclusive Business Summit 2023 yang mengangkat isu terkait peran vital OMS dalam mendukung bisnis inklusif dan SDGs yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia selaku tuan rumah dari 6th ASEAN Inclusive Business Summit 2023.

Persepsi positif pemerintah terhadap OMS juga dirasakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Mekanisme Swakelola Tipe III yang mengamankan OMS sebagai salah satu pelaksana implementasi mulai mendapatkan respon positif. KPPPA mengeluarkan SK Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Pencapaian Kinerja melalui Strategi Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat. Alokasi RUP melalui Swakelola Tipe III di Pemerintah di tingkat provinsi, kota dan kabupaten meningkat 0,24% di tahun 2023 dari 0,4% di tahun 2022.

Era digital memoderasi eksistensi OMS berada pada *search engine optimization* (SEO) untuk meningkatkan visibilitas. Beragam *platform* media sosial memberikan kemudahan kepada OMS untuk membuat publikasi organisasi, baik isu maupun kelembagaannya. Dalam laporan survei Konsil LSM Indonesia (2023) tentang kondisi eksisting dan kapasitas kelembagaan OMS di Indonesia ditemukan bahwa tingkat penggunaan media sosial OMS paling banyak adalah Facebook (71,3%) dan Instagram (63,4%), urutan selanjutnya adalah Youtube (40,8%) dan twitter (22,6%). Sementara kepemilikan website hanya dimiliki oleh 254 organisasi. Ketersediaan media digital untuk publikasi kerja-kerja OMS idealnya dibarengi dengan peningkatan kapasitas literasi digital dan pengelolaan media baru. Pemanfaatan beragam platform media di era digital dapat memutus lingkaran ketidakpercayaan publik terhadap OMS.

Selain melalui aspek media, citra publik OMS juga dapat ditingkatkan melalui kerja nyata mereka, seperti memberikan penghargaan kepada kinerja pemerintah. Hal ini dilakukan oleh LSM Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan LSM Pemerhati Situasi Terkini (PST) yang memberikan penghargaan kepada kinerja Kejari Kota Palembang dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Di Minahasa, Forum Rakyat Anti Korupsi (FRAKO) yang terdiri dari beberapa LSM anti korupsi memberikan penghargaan kepada Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stevani Kumendong atas kinerja dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Minahasa. MAKI Jawa Timur menggelar ‘Harmony of Spirit Hakordia 2023’ yakni ajang pemilihan duta anti korupsi mulai dari tingkat PAUD sampai dewasa. Di Kota Singkawang Forum Bersama Rakyat Harmoni (ForBERANI) yang bekerjasama dengan USAID MADANI menyelenggarakan Festival Inovasi OMS (FIO) Singkawang. Festival ini diikuti oleh beragam OMS yang bergerak di isu kesehatan, pendidikan, pendampingan hukum, buruh, UMKM, media

kreatif dan lainnya. Festival berisi kegiatan berupa pameran, talkshow, mural, donor darah, dan pertunjukan seni dan budaya. penghargaan juga diberikan kepada private sektor, hal ini seperti yang dilakukan oleh KEHATI. Pada tahun 2023, KEHATI memberikan *ESG Award* kepada 14 perusahaan yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu sektor *capital market*, sektor *impact investment*, dan Sektor *Debt & Project Financing*.

Secara umum tindakan OMS terhadap akuntabilitas dan transparansi telah dimuat dalam AD/ART masing-masing OMS. Namun tantangannya adalah bagaimana prinsip atau garis besar organisasi tentang akuntabilitas dan transparansi dijalankan. Misalkan laporan tahunan, beberapa OMS melakukannya, namun hanya mempublikasikan secara terbatas. Selain itu juga ditemukan bahwa publikasi laporan tahunan di website cenderung mundur, yaitu laporan tahunan 1 atau 2 tahun ke belakang. []

**INDEKS KEBERLANJUTAN
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
INDONESIA 2023**